UNIVERSITAS GADJAH MADA
Implementasi Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Jangka Waktu Pada Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Ronaldo Putra Rizky Bagut, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Chidir, *Hukum Perdata: Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992.

Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982.

Lloyd, Lord dan M. D. A. Freeeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence,* Steven & Son, London, 1985.

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia – Edisi Kedelapan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Nasution, S., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris*, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Shubhan, M. H., *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soemardjono, M. S. W., *Pembuatan Pedoman Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Suci, I. D. A., *Hukum Kepailitan: Karakteristik Renvoi Prosedur dalam perkara Kepailitan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2008.

Implementasi Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Jangka Waktu Pada Renvoi Prosedur Dalam
Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Ronaldo Putra Rizky Bagut, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

B. Artikel Jurnal

Gilson, Stuart C., Kose John and Larry H. P. Lang, "Troubled debt restructurings*1: An empirical study of private reorganization of firms in default", *Journal of Financial Economics*, No. 27, Mei 1990.

Gross, Tal, Raymond Kluender, Feng Liu, Matthew J. Notowidigdo and Jialan Wang, "The Economic Consequences of Bankruptcy Reform.", *American Economic Review*, Vol. 111, No. 7, Juli 2021.

Grybinenko, Olga, "Social and Economic Consequence of Bankruptcy of the Companies in Ukraine", *Eureka: Social and Humanities*, No. 2, 2017.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 1, Juli 2019

Nurhayati, Yati et al., "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

Putra, D. N. R. A., "Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018.

Shubhan, M. H., "Wisnu Cahyono, Wahyu Haris Kusuma, G. Reerink, Kevin Omar Sidharta, Catarina Frade, Paula Fernando, Ana Filipa, dan Sharyn Graham Davies. "The effects of reforming regulation in resolving insolvency towards EODB rank improvement: Evidence from Indonesia." *International Insolvency Review*, Vol. 20, April 2020.

Wijayanta, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Adeleine, 2012, Penerapan Pemeriksaan Secara Sederhana oleh Pengadilan Niaga terkait Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara Bantahan (*Renvoi Procedure*) pada Kasus Kepailitan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Hasil Penelitian*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan, *Hasil Penelitian*,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Implementasi Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Jangka Waktu Pada Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Ronaldo Putra Rizky Bagut, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Raditya, Rian, 2014, *Renvoi* Prosedur sebagai Upaya Hukum terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Suatu Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 32/PAILITKEBERATAN/2010/PN.NIAGA.JKT.PST), *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suci, I. D. A., 2018, Karakteristik Hukum Acara *Renvoi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Wijaya, Rinta Nervindya, 2018, Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Perizinan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

D. Internet

The Economic Times, "Definition of 'Ease of Doing Business'", *https://economictimes.indiatimes.com/definition/Ease-of-Doing-Business*, diakses pada 30 Juni 2021.

The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary 2nd End, "Bankrupcty", *https://thelawdictionary.org/bankruptcy/*, diakses pada 8 Maret 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Faillissements-verordening (S. 1905-217).

Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) (S. 1941-44).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Jangka Waktu Pada Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Ronaldo Putra Rizky Bagut, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

F. Lain-lain

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1989.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *jo*. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

G. Wawancara

Wawancara dengan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Heru Pramono, pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 12.00 WIB di Mahkamah Agung Republik Indonesia.